



PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

### Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
  - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
  - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
  - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
    1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
  3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
  8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*);
  10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
  15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
  18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
  19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
  20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
  2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
  3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
  4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
  5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
  7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
  8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
  9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
  10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
  11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
  12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
  13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
  14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
  15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
  - 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
  - g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Juni 2025  
BUPATI BANTUL  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025  
**KAPANEWON SEDAYU**  
KABUPATEN BANTUL

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sedayu. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi</b>	<b>Persen</b>	100	60.000.000			0%	0%	
2.22.5.07	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi</b>	<b>persen</b>	100	60.000.000			0%	0%	
2.22.08.507.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	60.000.000			0%	0%	
4.01.04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas</b>	<b>persen</b>	100	113.577.400			0%	0%	
4.01.04.5.01	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan</b>	<b>persen</b>	100	113.577.400			0%	0%	
4.01.04.501.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahanyang Didampingi	Dokumen	4	113.577.400			0%	0%	Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti
7.1.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Angka</b>	87	3.423.791.705	0	895.041.738	0%	26%	
7.1.1.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	100	4.950.000	33	900.000	33%	18%	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.150.000	2	450.000	29%	14%	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	2	450.000	40%	25%	

(1)	(2)	(3)	(4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		(8)
				(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>7.1.1.2.0 2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>2.970.236.919</b>	<b>23</b>	<b>807.358.876</b>	<b>23%</b>	<b>27%</b>	
7.1.1.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	2.920.751.919	18	795.081.376	<b>100%</b>	<b>27%</b>	
7.1.1.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	48.360.000	1	12.090.000	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
7.1.1.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.125.000	4	187.500	<b>18%</b>	<b>17%</b>	
<b>7.1.1.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.400.000</b>	<b>25</b>	<b>600.000</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
7.1.1.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	1	600.000	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
<b>7.1.1.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>150.537.298</b>	<b>20</b>	<b>26.921.500</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>	
7.1.1.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.891.475	1	1.600.000	<b>25%</b>	<b>33%</b>	
7.1.1.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.836.683	1	3.713.000	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
7.1.1.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.635.140	1	1.470.000	<b>25%</b>	<b>26%</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	13.317.000	1	2.929.500	25%	22%						
7.1.1.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.750.000	4	684.000	100%	25%						
7.1.1.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	382	102.882.000	74	14.725.000	19%	14%						
7.1.1.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.325.000		825.000	0%	35%						
7.1.1.2.0 6.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3.900.000	0	975.000	0%	25%						
<b>7.1.1.2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>28.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>						
7.1.1.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	28.850.000			0%	0%	Menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I)					
<b>7.1.1.2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>141.788.588</b>	<b>29</b>	<b>34.003.862</b>	<b>29%</b>	<b>24%</b>						
7.1.1.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42.900.000	3	9.224.348	25%	22%						
7.1.1.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	10.340.000	2	2.110.000	40%	20%						
7.1.1.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	88.548.588	1	22.669.514	25%	26%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7) = (6) / (5)	(8)
								K	Rp		K	Rp		
<b>7.1.1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>125.028.900</b>	<b>20</b>	<b>25.257.500</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>					
7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	6	117.208.500	4	25.257.500	67%	22%					
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	7.820.400			0%	0%					
<b>7.1.2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>persen</b>	<b>92</b>	<b>26.700.000</b>	<b>25</b>	<b>3.700.000</b>	<b>27%</b>	<b>14%</b>					
<b>7.1.2.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>21.500.000</b>	<b>25</b>	<b>3.500.000</b>	<b>28%</b>	<b>16%</b>					
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.800.000	1	1.700.000	25%	25%					
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	14.700.000	1	1.800.000	25%	12%					
<b>7.1.2.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>5.200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>					
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5.200.000	0	200.000	0%	4%					
<b>7.1.3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>93.425.000</b>	<b>23</b>	<b>25.700.000</b>	<b>23%</b>	<b>28%</b>					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	
<b>7.1.3.2.0 1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>55.175.000</b>	<b>25</b>	<b>24.800.000</b>	<b>28%</b>	<b>45%</b>						
7.1.3.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	20.000.000	7	20.000.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
7.1.3.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	35.175.000	1	4.800.000	<b>14%</b>	<b>14%</b>						
<b>7.1.3.2.0 3</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>	<b>38.250.000</b>	<b>20</b>	<b>900.000</b>	<b>22%</b>	<b>2%</b>						
7.1.3.2.0 3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	38.250.000	1	900.000	<b>20%</b>	<b>2%</b>						
<b>7.1.4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>148.330.000</b>		<b>875.000</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>						
<b>7.1.4.2.0 1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>148.330.000</b>		<b>875.000</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>						
7.1.4.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	148.330.000	0	875.000	<b>0%</b>	<b>1%</b>						
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	18.950.000			<b>0%</b>	<b>0%</b>						
7.1.5.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	18.950.000			<b>0%</b>	<b>0%</b>						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.5.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	18.950.000			0%	0%	
Jumlah					3.884.774.105		925.316.738			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti, mundurnya penyaluran Danais 2025 (tanggal 17 Maret 2025)
- b. Penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I karena menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran, sehingga akhirnya baru bisa dilaksanakan pada Triwulan II (setelah ada kepastian bahwa belanja modal bisa dilaksanakan).
- c. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga diharuskan untuk melakukan pengurangan pada beberapa belanja dengan nilai yang cukup signifikan. Pengurangan untuk Kapanewon Sedayu sejumlah Rp. 78.437.100,- sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

## Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KAPANEWON SEDAYU								3.686.204.419,00	3.851.196.705,00	3.806.337.005,00	120.132.586,00							4.916.577.714,00	
	2	URUSAN Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							170.000.000,00		
	2.22	URUSAN Pemerintahan bidang kebudayaan							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							170.000.000,00		
1,	2.22.0 8	PROGRAM Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00							170.000.000,00		
	2.22.08 .5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		170.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	2.22.08 .5.07.0 006	Gelar Budaya Jogja																			
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			170.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	4	UNSUR Pendukung urusan pemerintahan							40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00							66.040.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00							66.040.000,00		
1,	4.01.0 4	PROGRAM Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas				100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	26.040.000,00							66.040.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan				100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4.01.04.5.01.007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							<b>3.546.204.419,00</b>	<b>3.711.196.705,00</b>	<b>3.663.259.605,00</b>	<b>117.055.186,00</b>							<b>4.680.537.714,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>3.546.204.419,00</b>	<b>3.711.196.705,00</b>	<b>3.663.259.605,00</b>	<b>117.055.186,00</b>							<b>4.680.537.714,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>				<b>88 angka</b>	<b>88 angka</b>	<b>3.257.743.419,00</b>	<b>3.423.791.705,00</b>	<b>3.393.954.605,00</b>	<b>1.068.494.295,00</b>							<b>4.326.237.714,00</b>	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		26.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	5 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</i>				100 persen	100 persen	2.805.244.634,00	2.970.236.919,00	2.970.236.919,00	164.992.285,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		2.781.217.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.755.759.634,00	2.920.751.919,00	2.920.751.919,00	164.992.285,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.651.217.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			125.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				22 Laporan	22 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	150.756.497,00	150.537.298,00	120.700.198,00	-30.056.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		447.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.891.475,00	4.891.475,00	4.891.475,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.673.682,00	14.836.683,00	11.023.083,00	-3.650.599,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			29.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	5.254.340,00	5.635.140,00	5.635.140,00	380.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	13.330.000,00	13.317.000,00	10.264.500,00	-3.065.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-250.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				382 Laporan	292 Laporan	103.382.000,00	102.882.000,00	81.561.000,00	-21.821.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.325.000,00	2.325.000,00	1.725.000,00	-600.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	2.850.000,00	-1.050.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</i>				100 persen	100 persen	31.100.000,00	28.850.000,00	28.850.000,00	-2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		255.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	3 Unit	31.100.000,00	28.850.000,00	28.850.000,00	-2.250.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			210.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				100 persen	100 persen	136.733.788,00	141.788.588,00	141.788.588,00	5.054.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		305.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	-300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			75.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	5 Laporan	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	83.193.788,00	88.548.588,00	88.548.588,00	5.354.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			190.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</i>				100 persen	100 persen	126.558.500,00	125.028.900,00	125.028.900,00	-1.529.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		505.520.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	5 Unit	118.728.500,00	117.208.500,00	117.208.500,00	-1.520.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			205.520.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	7.830.000,00	7.820.400,00	7.820.400,00	-9.600,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
2,	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				<b>93 Persen</b>	<b>93 Persen</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>						<b>000,00</b>	<b>40.900.</b>	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</i>				90 persen	90 persen	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu	000,00	25.900.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				4 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	13.050.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	12.850.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</i>				90 persen	90 persen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu	000,00	15.000.	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	15.000.	KAPANEWON SEDAYU
3,	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>				<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>99.126.000,00</b>	<b>93.425.000,00</b>	<b>84.400.000,00</b>	<b>-23.226.000,00</b>						<b>000,00</b>	<b>75.900.</b>	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</i>				90 persen	90 persen	52.426.000,00	55.175.000,00	54.575.000,00	2.149.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu	000,00	43.700.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				7 Lembaga Kemasyarakan	7 Lembaga Kemasyarakan	12.201.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.799.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	10.000.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	7 Laporan	40.225.000,00	35.175.000,00	34.575.000,00	-5.650.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	33.700.	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				90 persen	90 persen	46.700.000,00	38.250.000,00	29.825.000,00	-16.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		000,00	32.200.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	46.700.000,00	38.250.000,00	29.825.000,00	-16.875.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		000,00	32.200.	KAPANEWON SEDAYU	
4,	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon</b>				<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>144.935.000,00</b>	<b>148.330.000,00</b>	<b>140.855.000,00</b>	<b>-95.435.000,00</b>						<b>000,00</b>	<b>49.500.</b>		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	144.935.000,00	148.330.000,00	140.855.000,00	-4.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		000,00	49.500.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	144.935.000,00	148.330.000,00	140.855.000,00	-4.080.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			49.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
5,	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>				<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>18.950.000,00</b>	<b>17.350.000,00</b>	<b>170.300.000,00</b>						<b>188.000.000,00</b>			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	17.700.000,00	18.950.000,00	17.350.000,00	-350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu	reformasi politik,	188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	17.700.000,00	18.950.000,00	17.350.000,00	-350.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		reformasi politik,	188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
<b>J U M L A H</b>									<b>3.686.204.419,00</b>	<b>3.851.196.705,00</b>	<b>3.806.337.005,00</b>	<b>446.722.277.382,41</b>						<b>4.916.577.714,00</b>		

tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Panewu Sedayu



ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP  
NIP. 19770726199511 1 001